

PENERAPAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN "PROGRAM INDONESIA PINTAR" DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Wahdania Suardi ¹, Eko Priyo Purnomo ², Lubna Salsabila ³

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia ^{1,2,3}

E-mail Correspondence: lubna.salsa@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas Kebijakan Pendidikan Program Indonesia Pintar dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan penelitian kualitatif berdasarkan fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam pengumpulan data, penulis memperoleh dari studi literatur berupa pemberitaan media online, website terbaru, artikel ilmiah penelitian sebelumnya, dan laporan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Temuan penelitian ini adalah angka putus sekolah tidak pernah tercapai tahun lalu. Lima dari 1.000 siswa sekolah dasar putus sekolah pada tahun 2017. Namun, jumlah ini meningkat di tingkat sekolah menengah. Artinya, 30 dari 1.000 anak putus sekolah. Empat dari 1.000 siswa sekolah dasar putus sekolah pada tahun 2019. Namun, jumlah ini meningkat di tingkat sekolah menengah, di mana 18 dari 1.000 anak putus sekolah. Dengan demikian, kebijakan Indonesia Pintar belum mampu menjadi solusi pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan karena Indonesia belum mencapai target drop minimum tahun lalu.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar, SDG.

ABSTRACT

This article discusses Smart Indonesia Program Education Policies in the Perspective of Sustainable Development in Indonesia. A qualitative research approach based on social phenomena and human problems. In data collection, the authors obtained from literature studies in the form of online media coverage, the most recent websites, scientific articles of previous research, and government reports through the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. The findings of this study is that the drop-out figure had never been reached last year. Five out of 1,000 primary school students dropped out of school in 2017. However, this number is increasing at the secondary school level. That is, 30 out of 1,000 children drop out of school. Four out of 1,000 primary school students dropped out of school in 2019. However, this number is increasing at the high school level, where 18 out of 1,000 children drop out of school. Thus, the Smart Indonesia policy has not

been able to become a sustainable development solution in the education sector because Indonesia did not reach the minimum drop goal last year.

Keywords: *Policy Implementation, Smart Indonesia Program, SDG.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kematangan sistem pendidikan di Indonesia dengan mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendidikan merupakan hak dasar warga negara Indonesia, dan oleh karena itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan keinginan dan keterampilannya, tanpa memandang kelas sosial, status ekonomi, ras, suku, agama, dan jenis kelamin (Saraswati, 2017). Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang penting dalam mencapai kemajuan dalam berbagai konteks, seperti ekonomi, masyarakat, politik, dan budaya (Rohaeni & Saryono, 2018). Pelatihan untuk pembangunan berkelanjutan memainkan peran penting dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah konsep multidisiplin yang mencerminkan konsep pertumbuhan dari perspektif sosial, ekonomi dan lingkungan (Bhawani, 2009; Yousef, 2008).

Pelaksanaan strategi Program Indonesia Pintar merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kemajuan pendidikan untuk memastikan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, untuk

itu perlu dilakukan komunikasi yang efektif, didukung oleh keuangan yang memadai, perangai yang baik dan ketepatan sistem birokrasi dalam pelaksanaannya (Nurwan, 2019). Konsep tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang tujuan pendidikan nasional yaitu pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakhlak mulia, baik, arif, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan akuntabel (Ghany, 2018). Melihat pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan pada pendidikan untuk semua anak (Murniningtyas & Endah, 2018). Pendidikan secara signifikan akan mempengaruhi keberlangsungan pertumbuhan dan keberlanjutan bangsa dan negara Indonesia (Retnaningsih, 2017).

Gambar 1. Data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: Drop Rate 2017-2019

	Drop-out Rate	
	SD	SMP / Sederajat
Tahun		

2017	5 *	30 *
2019	4 *	18 *

* per 1000 siswa

Menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi standar pendidikan maka semakin tinggi pula angka putus sekolahnya. Pada 2017, lima dari 1.000 anak sekolah dasar putus sekolah. Namun, angka ini meningkat di tingkat sekolah menengah (SM) / sederajat, yaitu 30 dari 1.000 anak putus sekolah (Rahmawati, 2017). Pada 2019, empat dari 1.000 anak Sekolah Dasar (SD) putus sekolah. Namun angka ini terus meningkat di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SM) / sederajat, di mana 18 dari 1000 anak SM / sederajat putus sekolah (Mega; dkk. Silviliyana, 2019).

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada fenomena sosial dan isu kemanusiaan (Iskandar, 2017). Fokus analisis ini bersifat interpretatif, yang menekankan pada persepsi konteks peristiwa sosial, untuk mempelajari perspektif tertentu tentang topik penelitian dalam terang bukti aktual. (Akbar & Purnomo, 2019). Data diperoleh dari studi literasi berupa liputan media online, website terbaru, artikel ilmiah penelitian sebelumnya, dan laporan pemerintah melalui website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai Kondisi Pendidikan di Indonesia. serta Program Indonesia Pintar dan laporan resmi yang dikeluarkan

oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tentang Pendidikan di Indonesia. Data tersebut kemudian diolah untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di Indonesia yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di bidang Pendidikan dalam bentuk naratif dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016). Menganalisis data, kemudian mereduksinya menjadi apa yang diinginkan penulis, dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan jenis kesimpulan.

Studi sebelumnya terkait pengenalan Program Kebijakan Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 1 Kolakaasi, Kabupaten Kolaka. Hal tersebut belum sepenuhnya tercapai, karena masih terdapat siswa miskin yang belum mendapatkan Program Indonesia Pintar (Agusman, 2019). Penelitiannya tentang Penerapan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan, juga dilakukan oleh (Rohaeni & Saryono, 2018) dan mengungkapkan bahwa masih perlunya dilakukan evaluasi. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Haqiqi, 2019), Menantang evaluasi program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, disimpulkan tidak berjalan dengan baik.

Dengan demikian, yang membedakan pada teks tersebut adalah bahwa penelitian ini akan mencoba melihat sejauh mana implementasi kebijakan program Indonesia Pintar di Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan menitikberatkan pada angka putus sekolah dan sebarannya. Dana melalui program Indonesia Pintar sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak anak. Anak-anak memiliki kesempatan untuk bersekolah dan dididik, seperti tujuan pembangunan berkelanjutan. Dimana Pendidikan adalah untuk semua. Tanpa pengecualian. Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Apa Standar Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia? dan, (2) Bagaimana penyaluran dana Program Indonesia Pintar di Indonesia?

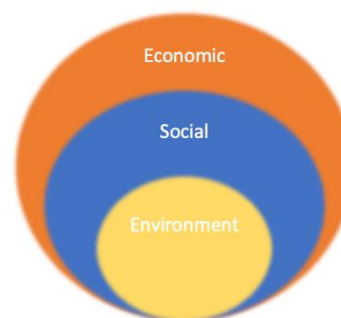
KAJIAN PUSTAKA

1. Pembangunan Berkelanjutan

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) harus menjadi inti dari komitmen untuk membangun masa depan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan masa depan suatu negara (Expósito & Sánchez, 2020). Dalam literatur, Education Sustainable Development (EDS) secara umum dipandang sebagai pendekatan dalam pendidikan yang memungkinkan berkembangnya pengetahuan, keterampilan, sikap, dan

nilai-nilai yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Hajdukiewicz & Pera, 2020).

Gambar 2: Prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: (Rahadian, 2016)

Menghilangkan kesenjangan pendidikan antara satuan pendidikan di Indonesia dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar dan pra-sekolah, serta memastikan bahwa mereka juga melanjutkan pendidikan di tingkat dasar dan menengah untuk meningkatkan keterampilan berhitung mereka, disebut-sebut sebagai salah satu dari tujuan yang paling penting pada tahun 2030. Hal ini akan memajukan pendidikan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melanjutkan pendidikan tinggi (Yu et al., 2020).

Dalam pembangunan berkelanjutan, tiga indikator harus diperhatikan. Setiap negara dapat menentukan bagian mana yang perlu

diprioritaskan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan perlindungan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Rahadian, 2016)

2. Implementasi Kebijakan Publik

Lingkungan kebijakan, konteks spesifik, peristiwa seputar masalah kebijakan yang terjadi, mempengaruhi, dan mempengaruhi kebijakan yang mengandung proses dialektis, artinya dimensi obyektif dan subyektif pembuat kebijakan tidak dapat dipisahkan dalam praktiknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang diciptakan melalui pilihan sadar oleh para pelaku kebijakan (Fatah, 2013).

Kebijakan publik di bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesi, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan pendidikan (Munadi, 2011). Menurut (Tilaar, 2001) Dengan sendirinya memberikan arti yang sedikit berbeda dengan “kebijakan pendidikan”, menurutnya kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang diwujudkan atau dicapai melalui lembaga sosial atau organisasi kemasyarakatan formal dan nonformal, dan pendidikan. institusi. Informal.

Implementasi kebijakan dengan perspektif top-down dikembangkan (Agustino, 2016) menamakan model

implementasi kebijakan publiknya sebagai Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi. Pelaksanaan kebijaksanaan itu penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan, karena jika tidak ada implementasi, kebijaksanaan hanya akan menjadi mimpi atau rencana yang baik yang tersimpan dalam sebuah file. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu dilaksanakan, sehingga tidak hanya menjadi pemborosan (Pramudiana, 2017). Empat variabel berperan penting dalam menentukan sukses tidaknya implementasi kebijakan publik:

- (1) Komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara memadai apabila terdapat komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dan kelompok sasaran.
- (2) Sumber daya, menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang baik harus mendukung setiap kebijakan.
- (3) Disposisi menunjukkan bahwa karakter pelaksana sangat erat kaitannya dengan mempengaruhi keberhasilan kebijakan.
- (4) Struktur Birokrasi, meliputi distribusi struktur organisasi, distribusi kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder (Iskandar, 2017). Data diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan lembaga resmi lainnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang bersumber langsung dari pengumpul data (Sugiyono, 2016). Data yang dikumpulkan berupa file dan dokumentasi yang terkait erat dengan Program Indonesia Pintar (PIP) demi pembangunan berkelanjutan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hasil tersebut disertai dengan data tambahan dari media online, website baru, dan makalah ilmiah dari penelitian sebelumnya.

Analisis ini bersifat interpretatif, menyortir pemahaman tentang makna suatu fenomena sosial, untuk mempelajari sudut pandang tertentu tentang topik penelitian dalam arti bukti terkini (Akbar & Purnomo, 2019). Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dengan cermat untuk menjelaskan pelaksanaan strategi Program Indonesia Pintar (PIP) di Indonesia mengikuti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di bidang pendidikan dalam bentuk narasi. Operasi pengolahan data dengan eliminasi data, penyajian dan penyelesaian data (Sugiyono, 2016). Dari data yang terkumpul direduksi sesuai kebutuhan penulis dan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik kemudian disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Standar Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Untuk saat ini, keberlanjutan berkelanjutan adalah gagasan inti dan sarana untuk memahami lingkungan dan mengatasi masalah global. Pendidikan untuk semua dan menyadarkan generasi mendatang tentang pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan pedoman diplomasi ekonomi dunia termasuk di antara 17 prioritas pembangunan berkelanjutan. Indonesia merupakan negara yang ikut serta dalam pengadopsian prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pendidikan.

Education for Sustainable Development (ESD) merupakan konsep multidisiplin yang memandang konsep pembangunan dari sudut pandang sosial, ekonomi dan lingkungan (Listiawati, 2013). Definisi tersebut memang bukan yang terbaru, namun disimpulkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, melihat angka putus sekolah di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan bahwa tidak semua anak di Indonesia menjadikan sekolah sebagai prioritas pembangunan berkelanjutan.

Gambar 3. Drop Rate 2017-2019

Karakteristik	Tingkat Pendidikan		
	SD (2017-2019)	SMP (2017-2019)	SMA (2017-2019)
Total	0.53-0.37	1.76-1.07	3.35-1.76
Jenis Area			
Perkotaan	0.45-0.36	1.26-0.85	2.65-1.67
Pedesaan	0.61-0.39	2.29-1.33	4.29-1.92
Jenis Kelamin			
Laki - Laki	0.51-0.39	2.06-1.14	3.41-1.80
Perempuan	0.55-0.36	1.45-1.00	3.28-1.73

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2019

Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. Angka putus sekolah global di Indonesia. Mengingat peningkatan angka putus sekolah dari 2017 menjadi 19. Namun, angka ini tidak layak untuk mencapai target setiap tahun (Listiawati, 2013). Definisi tersebut memang bukan yang terbaru, namun disimpulkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, melihat angka putus sekolah di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan bahwa tidak semua anak di Indonesia menjadikan sekolah sebagai prioritas

pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. Angka putus sekolah global di Indonesia. Mengingat peningkatan angka putus sekolah dari 2017 menjadi 19. Namun, angka ini tidak layak untuk mencapai target setiap tahun.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar dengan memperkenalkan Program Wajib Belajar 12 Tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah untuk meningkatkan jumlah program pendidikan berkelanjutan yang ditandai dengan penurunan angka putus sekolah. Strategi strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki target angka putus sekolah hanya satu persen di setiap jenjang pendidikan (SD / SMP / SM) (Rahmawati, 2017). Pada tahun 2017, tingkat SD memenuhi target tersebut (0,53%) sedangkan angka putus sekolah SM juga tidak dapat memenuhi target tersebut (3,35 persen). Sementara itu, target pendidikan SD mencapai 0,37% pada tahun 2019, sedangkan angka putus sekolah SMP dan SMA belum mencapai target (1,07% dan 1,76%).

Gambar 3 menunjukkan tren bahwa semakin tinggi standar sekolah, semakin tinggi angka putus sekolah. Lima dari 1.000 siswa SD putus sekolah pada tahun 2017. Namun, jumlah ini meningkat di jenjang SMA / sederajat, yaitu 30 dari 1.000 anak putus sekolah.

Empat dari 1.000 siswa sekolah dasar putus sekolah pada tahun 2019. Namun, jumlah ini meningkat di tingkat sekolah menengah / sederajat di mana 18 dari 1.000 anak sekolah menengah / sederajat putus sekolah. Angka putus sekolah di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Perbedaan antara statistik perkotaan dan pedesaan meningkat seiring dengan peningkatan standar pendidikan. Sementara itu, angka putus sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan pada semua jenjang sekolah (Mega Silviliyana et al., 2019).

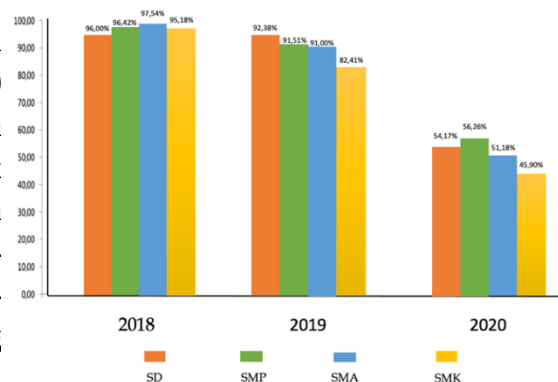
Salah satu tolok ukur Indonesia dalam Voluntary National Review 2019 mengenai tujuan keempat SDGs adalah anak tidak bersekolah. Pengukuran metrik untuk anak yang tidak bersekolah telah disesuaikan dengan norma global. Anak-anak yang saat ini menyelesaikan pra-sekolah dan semua usia 16-18 tahun yang tidak lagi di taman kanak-kanak tetapi masih memiliki ijazah sekolah menengah atas / sederajat dianggap telah bersekolah. Usia yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah usia awal tahun pembelajaran (Silviliyana et al, 2019)

1. Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (PIP)

Harus dipahami bahwa norma dan prioritas kebijakan adalah untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan rencana. Sasaran kebijakan merupakan topik penting dan memberikan alasan bagi kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan

tersebut. Tanpa target pengembangan kebijakan, tidak mungkin menghitung tingkat kemajuan kebijakan. Bagaimana menilai kemajuan dalam suatu program membutuhkan norma, metrik, atau tujuan untuk menentukan hasil kepatuhan yang berada di luar tujuan asli pembuat kebijakan (Agusman, 2019)

Gambar 5. Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Nasional (PIP) per Satuan Pendidikan



Alokasi Program Indonesia Pintar (PIP) antara tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan tingkat pencairan dari target yang ditetapkan setiap tahun. Data di atas merupakan alokasi dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh satuan pendidikan. Mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Teknik (SMK). Di tingkat Sekolah Dasar (SD) tahun 2018, terlihat pencairan dana untuk program-program

di Indonesia mencapai 96,00%. Dari dana yang dialokasikan sebesar Rp. 4.212.276.300 untuk diterima oleh 10.379.253 siswa dengan biaya sebesar Rp. 4.052.123.550.000 hingga 9.964.107 guru. Pada tahun 2019, pencairan dana untuk Per Satuan Pendidikan di tingkat sekolah dasar naik 92,38% dari total siswa yang memperoleh pendanaan dari skema Indonesia Pintar. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup besar pada volume dana yang dikucurkan oleh siswa sekolah dasar, termasuk 54,15% dari total siswa yang memperoleh dana dari skema Indonesia Pintar. Tetapkan jumlah dana yang akan dialokasikan menjadi Rp pada tahun 2020. 4.212.276.300.000, tetapi hanya 2.168.936.775.000 yang dicairkan pada akhir tahun 2020.

Penurunan di jenjang Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari 2018 hingga 2020. Pemerintah terus menyalurkan dana Rp pada 2018. 2.721.228.375.000 untuk disalurkan kepada 4.751.246 siswa dan jumlah yang berhasil dicairkan adalah Rp. 2.629.053.375.000 dan total 4.581.333 siswa mendapatkan dukungan dari Inisiatif Indonesia Pintar (PIP). Jika diakumulasikan pada tahun 2018, Sekolah Menengah Pertama (SMP) mampu membayar 96,42% dari keseluruhan siswa secara keseluruhan. Rasio sekolah menengah pertama (SMP) menurun pada tahun 2019, dengan total 91,51% siswa memperoleh dana. Serta mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 yaitu

hanya 56,26% dari total siswa penerima dana program Indonesia Pintar yang mencairkan dananya.

Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018, total pencairan dana sebesar Rp. 1.174.988.500.000 untuk 1.516.701 siswa dan yang berhasil dicari adalah 1.149.643.500.000 dari 1.479.346 siswa. Dalam hal ini, pada 2018 97,84% dana telah dicairkan. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi sedikit penurunan jumlah pencairan dana dari total penyaluran Rp. 1.174.988.500.000, hanya 91,74% siswa yang menarik dana. Hal yang sama berlaku untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2020, juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Penyaluran dana baru disalurkan oleh 51,18% pelajar di Indonesia. Tahun 2020, di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp. 1.181.672.500.000 untuk 1.412.212 siswa di Indonesia. Namun, hanya 731.734 siswa yang mengucurkan dana Program Indonesia Pintar di Indonesia.

Pada Gambar 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari tahun 2018 hingga 2020 kembali mengalami penurunan. Begitu pula dengan satuan pendidikan lainnya. Pada tahun 2018, 95,18% siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menikmati pencairan

dana yang disalurkan. Dari total dana yang disalurkan sebesar Rp. 1.604.551.000.000 ditujukan untuk 2.052.176 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. Sedangkan hanya Rp. 1.535.049.500.000 oleh 1.953.173 siswa. Pada 2019, dari 2.007.074 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hanya 1.653.945 siswa yang mengundurkan diri. Itu tandanya, hanya 82,41% siswa yang berhasil mencari dana untuk penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) ke satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia pada tahun 2019. Parahnya pada tahun 2020, dari 1.834.669 total sekolah menengah kejuruan siswa (SMK) di Indonesia. Hanya 842.071 siswa yang mencairkan dana ini. Jika diakumulasikan, hanya 45,90% siswa yang mencarinya. Dari total dana yang disalurkan sebesar Rp. 1.533.915.000.000 hanya Rp 668.479.000.000 yang telah dicairkan.

Dalam tahapan ini, beberapa hal harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (PIP) (Retnaningsih, 2017). Dengan demikian, hal tersebut dapat diukur dalam empat indikator dalam implementasi kebijakan (Nurwan, 2019). Dalam penerapan Indonesia Pintar (PIP), empat indikator harus diperhatikan, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan. Dalam hal

ini empat indikator yang perlu diperhatikan, yaitu (1) Komunikasi, sangat perlu diperhatikan. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam memanfaatkan dana bantuan oleh siswa / penerima. (2) Dalam hal ini sumber daya hampir tidak ada perannya bagi Dinas Pendidikan Provinsi / Kota dan instansi terkait. Tak bisa dipungkiri, Dinas Pendidikan bisa mengakses data Program Indonesia Pintar (PIP) setelah diberi kata sandi dan hanya bisa dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan. (3) Disposisi, disposisi dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) cukup sederhana karena sebenarnya mekanisme PIP secara kelembagaan tidak terlalu rumit. Hubungan birokrasi utama adalah antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah. Tetapi disposisi tidak berjalan sebagaimana mestinya. (4) Struktur Birokrasi, struktur birokrasi Program Indonesia Pintar (PIP) relatif sederhana karena hanya melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah. Yang berperan penting dalam hal ini adalah Operator Sekolah (ahli TI di sekolah) yang bertanggung jawab mengelola data pendidikan dasar (Dapodik) dan Kepala Sekolah yang membuat SK / rekomendasi pencairan dana bantuan. Dalam hal ini hampir tidak ada peran Dinas Pendidikan Provinsi / Kota. Namun, meski struktur birokrasinya cukup sederhana, Program

Indonesia Pintar (PIP) tidak selalu mulus. Melihat fenomena pencairan dana pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) di Indonesia pada tahun 2020, cukup menunjukkan permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar di Indonesia. Melalui program ini, pemerintah berupaya untuk mencegah siswa putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik minat siswa yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan, terutama siswa yang putus sekolah karena kendala ekonomi. Kebijakan Indonesia Pintar juga diproyeksikan dapat menurunkan biaya pendidikan pribadi siswa, baik langsung maupun tidak langsung (Sinuhaji, 2020). Selain dari sektor ekonomi, angka putus sekolah juga dipengaruhi oleh keadaan sosial dan lingkungan siswa. Untuk itu, pemerintah juga perlu lebih berkonsentrasi pada pendidikan untuk mencapai tujuan pertumbuhan sektor pendidikan yang berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Angka putus sekolah dinyatakan tidak ada di Indonesia dan semua anak memiliki hak untuk bersekolah dan menerima pendidikan yang mereka butuhkan untuk mendukung masa depan mereka. Berdasarkan hasil penelitian di atas, angka putus sekolah dari Serikat Pendidikan menurut jenis kelamin masih belum memenuhi target per tahun. Kehadiran Program Indonesia Pintar (PIP) yang mengucurkan dana cukup besar

setiap tahunnya ke setiap satuan pendidikan dari tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan penurunan. Dimana pencairan pada tahun 2020 hampir sama dengan pencairan yang dilakukan siswa per satuan pendidikan, hanya separuh dari dana yang dicairkan. Upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya di bidang ekonomi, dinilai kurang optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka putus sekolah dinyatakan tidak ada di Indonesia dan semua anak memiliki hak untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan untuk mendukung masa depan mereka. Analisis yang disinggung di atas, angka putus sekolah dan jenis kelamin Serikat Pendidikan belum memenuhi target tahunan. Hadirnya Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan dana cukup besar untuk setiap satuan pendidikan setiap tahun dari tahun 2018 hingga 2020, menunjukkan adanya pengurangan pendanaan. Pencairan pada tahun 2020 hampir sama dengan pencairan yang dilakukan siswa per unit sekolah, hanya separuh dari dana yang dicairkan.

Tahun sebelumnya, mulai 2018 hingga 2019, siswa per satuan pendidikan hampir menginjak angka 100% siswa melakukan pencairan dari dana yang disalurkan. Namun pada tahun 2020 kondisi saat itu semakin menurun. Gambar 3, sekitar 100% siswa per satuan pendidikan hanya

54,17% siswa yang bersekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD). Sedangkan 56,26% siswa yang mengeluarkan dana untuk program Indonesia Pintar di Indonesia pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 51,18% siswa pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan, 45,90% siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan satuan pendidikan (SMK).

Hal ini sejalan dengan pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan di bidang pendidikan. Sehingga seluruh anak Indonesia dapat bersekolah dan angka putus sekolah semakin menurun setiap tahunnya, hingga pada akhirnya dengan bantuan faktor lingkungan, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi dan lingkungan, dengan konektivitas yang memadai, sumber daya manusia, tata ruang, dan birokrasi. kerangka kerja.

DAFTAR PUSTAKA:

- Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4 (2) (201.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, P., & Purnomo, E. P. (2019). Model Dinasti Politik Kota Bontang. *Politik, Jurnal Wacana*, 4(2), 145–156.
- Bhawani, V. (2009). Education for sustainable development. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 51(2), 8–1.
- Expósito, L. M. C., & Sánchez, J. G. (2020). Implementation of SDGs in university teaching: A course for professional development of teachers in education for sustainability for a transformative action. *Sustainability (Switzerland)*, 12(19). <https://doi.org/10.3390/su12198267>
- Fatah, N. (2013). *F Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ghany, H. (2018). Penyelenggaraan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Madaniyah*, 8(2), 186-.
- Hajdukiewicz, A., & Pera, B. (2020). Education for sustainable development—the case of massive open online courses. *Sustainability (Switzerland)*, 12(20), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su12208542>

<http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/25381>

- Haqiqi, N. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Publika*, Volume 7,.
- Iskandar, J. (2017). Penerapan Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Madrasah. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Listiawati, N. (2013). Pelaksanaan Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan oleh Beberapa Lembaga. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol. 19, Nomor 3, September 2013.
- Munadi, M. B. (2011). *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: AR-Ruzz Media.
- Murniningtyas, A., & Endah, S. A. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Vol. III* (Issue 2).
- Nurwan, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 201. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>
- Pramudiana, I. D. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk ABK di Surabaya Ika Devy Pramudiana Universitas Dr . Soetomo Surabaya Email : Ik.pramudiana@gmail.com. *Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 1–9. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/article/view/317>
- Rahadian, A. H. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI, III*(01), 46–56. file:///C:/Users/USER/Downloads/strategi-pembangunan-berkelanjutan (1).pdf
- Rahmawati, Y. dkk. (2017). *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2017*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Retnaningsih, H. (2017). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Aspirasi*, 8(2), 161–177.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education*

- Management and Administration Review*, 2(1), 1–12.
- Saraswati, L. N. (2017). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (Pip) Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 5(4), 6738–6749.
- Silviliyana, Mega; dkk. (2019). *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2019*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Silviliyana, Mega, Maylasari, I., Agustina, R., Dewi, F. W. R., & Sulistyowati, N. P. (2019). *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2019*. xxii +252.
- Sinuhaji, J. (2020). *Cara Cairkan Dana Program Indonesia Pintar atau PIP 2020*. PikiranRakyatCom.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2001). *Manajemen pendidikan nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yousef, J. (2008). A new conceptual framework for sustainable development. *Environment, Development, and Sustainability*, 10(2), 179.
- Yu, S., Sial, M. S., Tran, D. K., Badulescu, A., Thu, P. A., & Sehleanu, M. (2020). Adoption and implementation of sustainable development goals (SDGs) in China-Agenda 2030. *Sustainability (Switzerland)*, 12(15), 1–16. <https://doi.org/10.3390/SU12156288>